

**KINERJA KANTOR PARIWISATA SENI DAN BUDAYA
KOTA PAYAKUMBUH DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA**

Skripsi

**Diajukan Untuk Mencapai Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas**

Oleh:

Doni Sartika

02 193 001



**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**

ABSTRAK

Doni Sartika, 02 193 001, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu social Dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Judul Skripsi Kinerja Kantor Pariwisata, Seni, dan Budaya Kota Payakumbuh Dalam Pengembangan Pariwisata, 72 Halaman, Referensi 22.

Kota payakumbuh bagian dari daerah Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai potensi alam yang begitu indah. dengan keindahan ini membuat pemerintah Kota Payakumbuh ingin memajukan Pariwisata dengan tujuan untuk bisa meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat serta meningkatkan daya saing dengan daerah lain. Dengan semangat otonomi daerah maka Kota Payakumbuh melalui Kantor Pariwisata melahirkan Visi adalah Mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai daerah tujuan wisata dengan menonjolkan ciri Adat Basarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABSSBK). Dengan lahirnya visi Kantor Pariwisata membuat program untuk mengembang pariwisata yang berpedoman kepada adat dan agama.

Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan pengembangan Pariwisata dan mendeskripsikan kendala- kendala yang terjadi dalam Pengembangan Pariwisata

Dengan penelitian ini, Peneliti menggunakan beberapa pendekatan teoritis yaitu konsep kinerja. Yang dimaksud konsep dalam penelitian ini adalah sebagaimana yang dimaksud oleh Lembaga Administrasi Negara. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan wawancara, dokumentasi dan observasi. Sementara untuk keabsahan data peneliti lakukan degan triangulasi sumber data. Pemilihan informan dilakukan teknik *porposive sampling*

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa ada ketidak pahaman pada konsep Pariwisata sehingga pembuatan orogram tidak sesuai dengan visdan misi yang sudah ditetapkan. Konsep Pariwisata itu tidak ada kejelasan baik itu pada penjabaran visi dan misi. Sedangkan untuk pelaksanaannya yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pariwisata tidak jalan karena ketidakpahaman pada konsep pengembangan Pariwisata.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lingkungan global maupun nasional telah membawa perubahan yang serius terhadap jalannya kehidupan politik dan pemerintahan. Pergeseran paradigma pelaksanaan Pemerintahan Daerah dari Orde Baru ke zaman Reformasi telah memberi angin segar terhadap pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Hal ini dibuktikan dengan adanya perubahan kedua UUD 1945 pasal 18 tentang Pemerintahan Daerah yang menuju kemandirian daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Dari perubahan pasal 18 UUD 1945 tersebut di atas disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diberi otonomi yang luas dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya tanpa campur tangan dari pemerintah pusat. Diharapkan dengan perubahan tersebut penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi lebih demokratis, mulai dari pemilihan anggota DPRD, pemilihan kepala daerah, serta pembuatan kebijakan daerah yang berupa peraturan-peraturan daerah dilakukan oleh daerah tanpa harus menunggu kebijakan atau petunjuk dari pusat.

Pelaksanaan Otonomi Daerah menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan secara utuh pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Konsekuensi dari hal tersebut di atas, pemerintahan daerah mendapat tantangan tugas yang semakin berat dalam menjalankan pemerintahan, serta meningkat pula tuntutan profesionalisme dan sumber daya manusia pada pemerintahan daerah agar pemerintah daerah mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

Hasil kerja yang dicapai oleh pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut dikenal dengan istilah kinerja. Kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan Kepala Daerah dalam memainkan strategi

organisasi yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan daerah, dan kemampuan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana kebijakan daerah.

Pemahaman terhadap UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah secara cermat, akan terlihat bahwa prinsip utama yang digunakan di dalam menentukan kualitas dan kuantitas perangkat daerah adalah "sesuai kebutuhan daerah". Artinya, tidak ada lagi bentuk dan jumlah unit-unit pemerintahan daerah yang seragam di seluruh Indonesia, melainkan bersifat variatif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing. Kata kunci, "sesuai kebutuhan Daerah" menunjukkan bahwa ukuran kebutuhannya bukan semata-mata menurut pandangan birokrasi pemerintah daerah seperti yang selama ini terjadi, tetapi lebih berdasarkan kebutuhan masyarakat akan pelayanan tertentu dari pemerintah daerah.¹

Sesuai dengan pendapat Wasistiono tersebut, maka Dinas Daerah sebagai bagian dari perangkat daerah merupakan ujung tombak dalam suksesnya implementasi kebijakan daerah. Dinas Daerah bertugas untuk memberikan pelayanan pada masyarakat, sebagai fungsi utama pemerintah. Dalam era otonomi daerah dinas daerah tidak hanya dibebani tugas pelayanan saja, tetapi juga diharapkan menjadi sumber pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kinerjanya dalam melaksanakan tugas. Kinerja pemerintah daerah dapat langsung dinilai dengan melihat bagaimana Dinas Daerah melaksanakan kebijakan daerah dan memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka implementasi Otonomi Daerah, Kota Payakumbuh telah menetapkan visi dan misi pembangunan. Visi kota yaitu *"Mewujudkan Kota Payakumbuh sebagai daerah tujuan wisata dengan menonjolkan ciri Adat Basandi Syara' Syara' Basandi Kitabullah (ABSSBK) yang memiliki daya saing*

¹ Sadu Wasistiono, 2000. *Esensi Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (bunga Rampai)*. hal. 29

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dengan dilaksanakannya otonomi daerah, maka berbagai urusan yang pada mulanya diurus oleh pemerintah pusat sekarang diiseraikan penyelenggaraannya kepada pemerintah daerah. Maka dari itu penyerahan kewenangan untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah harus diikuti dengan kemampuan setiap keterampilan, kesungguhan untuk menjalankan program yang sudah dibuat bersama. Pelaksanaan program bisa berhasil atau tidaknya tergantung pada sumber daya manusia dan kesungguhan dalam melaksanakan apa yang sudah menjadi program atau yang sudah ditetapkan dalam APBD. Visi dan Misi Kota Payakumbuh sangat bagus untuk dijalankan apalagi kondisi sangat mendukung untuk mengembangkan tapi ada keseriusan oleh para pelaksana jangan hanya simbol atau pelengkap dalam kertas dan LPJ tahunan.

Program dari Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Payakumbuh untuk mendukung visi dan misi belum ada yang menyentuh kepada adat apalagi pada agama sesuai dengan pepatah minang yang mengatakan *Syarak Mangato, Adat Mamakai*. Dari sini kita dapat melihat visi yang sudah ditetapkan itu belum ada realisasinya.

Dari apa yang sudah ditetapkan oleh Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Payakumbuh yang menjadi visi dan misi ada yang tidak sesuai dalam pelaksanaannya dan ketidakpahaman pada visi dan misi bagi pelaksana di lapangan. Kemudian pelaksanaan kantor sendiri hanya cuma pasrah dengan apa

yang terjadi dan tidak berupaya untuk mencari solusinya. Program yang direncanakan tidak sesuai tidak sesuai dengan visi dan misi.

Konsep pariwisata pada umumnya dipakai oleh Pemda Sumatera Barat dan juga di daerah Kabupaten dan Kota. Kota Payakumbuh juga memakai istilah pariwisata. Konsep pariwisata belum ada kejelasan. Dari konsep akan lahir program kerja kantor/dinas yang ada di Kota Payakumbuh. Namun kenyataan yang terjadi di Kota Payakumbuh konsep Pariwisata ABSSBK ini belum jelas dan mengakibatkan terganggunya pelaksanaan program kerja.

Pegawai Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Payakumbuh tidak memahami apa itu Pariwisata. Perlunya Suatu pemahaman terhadap konsep tentang pariwisata karena gabungan budaya dan agama didalam masyarakat sangat kental. Pegawai yang akan menjalankan program kerja yang sudah dibuat harus bisa memahami apa yang dikata dengan pariwisata dan maksud tujuan Pariwisata. Pemahaman suatu tujuan merupakan hal yangn harus dilakukan para aparatur pemerintahan kaerana ditangan merekalah lancar tidak lancarnya suatu program yang akan dicapai.

2. Saran

Supaya peningkatan pelaksanaan program dalam hal kinerja pengembangan pariwisata para pegawai kantor pariwisata diharapkan untuk segera melakukan upaya dalam mengatasi kelemahan yang terjadi yaitu:

- A. Kantor Pariwisata Seni dan Budaya Kota Payakumbuh harus membuat sebuah konsep Pariwisata sehinga memudahkan untuk menjalankan program kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Metodologi

- Bungin, Burhan. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Malcong, Lexi.J.2000. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung:Yayan Obor Indonesia

Buku Teori

- Apter, David E. 1984. *Pendekatan Tingkah Laku Dalam Ilmu Politik (suatu pengantar)*. Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Budiarjo, Marriam1992. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta ; Gramedia.)*
- Dwiyanto, Agus. 2002: *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta : UGM Press.
- Soekanto, Soejono. 1983. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: CV Rajawali Press
- Syafrudin, Ateng, 1976. *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*. Bandung ; Tarsito.
- Surayin, 2001. *Kamus Umum, Bahasa Indonesia*.(Yrama Widya.)
- M. Zikri, M, KS. 1970. *Pengaruh Akhlak Pejabat Pemerintahan Terhadap Jalannya Pemerintahan*. Skripsi Jurusan Pemerintahan Fakultas Sosial dan Politik, UGM, Yogyakarta.
- Widodo, Joko, 2001. *Good Governance, telaah dari dimensi akuntabilitas dan kontrol birokrasi pada era desentralisasi dan otonomi daerah*. Surabaya ; PT. Insan Cendekia.
- Wasistiono, Sadu.2000. *Esensi Undang- Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*(Bunga Rampai)

Undang- undang/laporan/ Jurnal

- Amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 18.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.
- Laboratorium Ilmu politik. 2007. *Pedoman Skripsi*. Padang Jurusan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Jurnal Ilmu Politik 1990. 7, Gramedia, 1990,